



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)
UNIT KERJA : BADAN PELAKSANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FADLUL IMANSYAH
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 219925

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/114 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 2.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	737.000.000
1. MOBIL, BMW 320I Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000		
3. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.587.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	13.848.818
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	351.853.824
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	9.690.202.642
III. HUTANG	Rp.	1.841.391.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.848.811.642

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.